

# Analisis Hasil Evaluasi Diri Mahasiswa Tentang Kurikulum Pendidikan Profesi Guru Kelas SD Prajabatan Bersubsidi Universitas Kristen Satya Wacana

**Gamaliel Septian Airlanda**

*Article submitted  
2018-12-16*

*Richard Gordon Mayopu  
Editor decision submitted  
2019-03-11*

## **Abstraksi**

Guru telah menjadi salah satu profesi yang menjanjikan dan banyak diminati belakangan ini. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah cara pemerintah melakukan seleksi dan pembinaan guru profesional yang mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan program PPG. Diperlukan evaluasi diri yang dapat menganalisis program PPG Prajabatan Bersubsidi. Hasil analisis evaluasi diri mahasiswa PPG akan mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi secara nyata hingga pada akhirnya dapat menunjang perbaikan program.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode survei menyeluruh. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei *online* menggunakan *google form* dengan indikator evaluasi diri mahasiswa tentang analisis kurikulum PPG Prajabatan. Indikator dikembangkan dari Panduan PPG 2017 sebagai bagian dari prinsip penjaminan mutu program. Hasil analisis evaluasi diri mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW adalah: 1) terdapat 78,2% mahasiswa yang belum memahami dengan jelas kelengkapan kurikulum PPG Prajabatan yang ada; 2) sebesar 52,7% mahasiswa bingung dalam memahami regulasi kurikulum PPG; 3) baru 40% mahasiswa berhasil memahami isi undang-undang yang berkaitan dengan guru profesional Indonesia; 4) sebesar 65,5% mahasiswa aktif dalam membahas tentang arah

perkembangan guru professional Indonesia. Tulisan ini sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan analisis kurikulum PPG Prajabatan.

### **Abstract**

*Teachers have become one of the interesting professions lately. Pendidikan Profesi Guru (PPG) is the way the government conducts selection and fostering professional teachers who are able to support the achievement of national education goals. However, there are some discrepancies in the planning and implementation of the PPG program. Self-evaluation is needed which can analyze the PPG program. The results of PPG student self-evaluation analysis will be able to identify problems that occur in a real way so that they can ultimately support the improvement of the program.*

*This study uses descriptive qualitative with a comprehensive survey method. The instrument used in this study is an online survey using google form with indicators of student self-evaluation about the analysis of the curriculum of PPG Prajabatan. Indicators are developed from the 2017 PPG Guide as part of the program quality assurance principle. The results of the self-evaluation of the UKSW's PPG students are: 1) there are 78.2% of students who have not clearly understood the completeness of the existing PPG Prajabatan curriculum; 2) 52.7% of students are confused in understanding PPG curriculum regulation; 3) only 40% of students successfully understand the contents of the law relating to Indonesian professional teachers; 4) 65.5% of students are active in discussing the direction of the development of Indonesian professional teachers. This paper is the first step to conduct further research related to the analysis of the curriculum of PPG Prajabatan.*

**Keywords:** *self-evaluation, pendidikan profesi guru*

### **Pendahuluan**

Guru telah menjadi salah satu profesi yang menjanjikan dan banyak diminati belakangan ini. Peningkatan kesejahteraan guru secara ekonomi menjadi tolok ukur yang masih dominan di kalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk menyeimbangkan tingkat kesejahteraan guru dengan kualitas layanannya. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah cara pemerintah melakukan seleksi dan pembinaan guru profesional yang mampu mendukung

tercapainya tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru diketahui bahwa:

“Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” (RISTEKDIKTI, 2017:12).”

Melalui program inilah, pemerintah berani menjamin kualitas guru yang dihasilkan telah sesuai dengan standar kualifikasi nasional Indonesia. Selain itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga diwajibkan mencetak calon guru-guru masa depan dengan standar yang baik, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) khususnya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) merupakan salah satu LPTK pencetak guru SD di Indonesia. Lembaga ini telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk membina program PPG Prajabatan Bersubsidi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 menjelaskan bahwa kategori peserta PPG Prajabatan adalah lulusan S1/D IV yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PGSD UKSW dipercaya membina 54 orang mahasiswa PPG Prajabatan untuk menjalani program selama 1 tahun. Mahasiswa tersebut merupakan lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan strata 1 (S1). Berikut ini adalah tabel pemetaannya.

**Tabel 1. Pemetaan Asal Lulusan Mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW**

No	Asal Perguruan Tinggi Sebelumnya	Jumlah Mahasiswa (Orang)
1	Universitas Kristen Satya Wacana	7
2	Universitas Negeri Semarang	35
3	Universitas Muria Kudus	3
4	Universitas Muhammadiyah Surakarta	2
5	Universitas Pendidikan Indonesia	1
6	Universitas Terbuka	2
7	Universitas Islam Sultan Agung	1
8	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	1
9	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	1
10	Universitas Veteran Sukoharjo	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>54</b>

Perbedaan ini ternyata membuat variasi pemahaman mahasiswa dalam beberapa hal, seperti: 1) seluk beluk program PPG, 2) pemahaman kurikulum SD, 3) perangkat pembelajaran, 4) kedalaman muatan pembelajaran SD. Hal ini dibuktikan

melalui hasil wawancara dengan mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW 2017 yang justru mengalami kebingungan ketika membahas keempat pemahaman dasar yang dituliskan di atas. Hampir keseluruhan dari mereka lebih dominan dengan motivasi peningkatan kesejahteraan pasca-lulus program PPG ketimbang memahami prinsip profesionalisme guru. Lebih dalam dari hal tersebut, kebanyakan dari mereka tidak memiliki pandangan tentang perbedaan guru profesional dengan guru tanpa program PPG. Sudut pandang lain jika ditinjau dari kesiapan mahasiswa menghadapi program ini, dapat diketahui dari periode sosialisasi program hingga tahap seleksi penerimaan. Kementerian melakukan sosialisasi program secara *online* pada 8 Juni 2017 dengan rentang pendaftaran mulai dari 13 Juni – 8 Juli 2017 (RISTEKDIKTI, 2017). Selisih waktu yang sangat singkat berpengaruh pada kesiapan masing-masing calon mahasiswa program PPG Prajabatan Bersubsidi. Namun di sisi lain, pemerintah diwajibkan memenuhi kuota penerimaan calon mahasiswa PPG dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan rancangan anggaran negara.

Pengelola teknis program PPG prajabatan bersubsidi diserahkan kepada LPTK yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian melalui *memorandum of understanding*. Namun PGSD UKSW, mendapatkan pengumuman resmi dari pemerintah untuk menjadi salah satu tim pengelola hanya berselang satu minggu sebelum program perkuliahan dilaksanakan. Satu hari sebelum pelaksanaan tahapan lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi, pengelola ini baru mendapatkan rincian daftar mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di PGSD UKSW. Cepatnya perubahan informasi membuat tim pengelola teknis memiliki keterbatasan dalam melakukan persiapan, termasuk memahami seluk beluk PPG yang belum disosialisasikan sebelumnya. Keadaan ini menjadi catatan penting bagi ketuntasan program yang memiliki tujuan, sebagai berikut:

“Tujuan program PPG adalah: a) untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; b) menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan c) mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (PERMENDIKNAS, 2013).”

Variasi pemahaman mahasiswa tentang indikator dasar guru profesional dan bukti nyata kesiapan program beserta manajemennya menjadi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan ideal yang dicanangkan pemerintah sendiri.

Program yang berjalan dengan beberapa catatan dan mendapat pandangan meragukan tentang hasil ketuntasannya, perlu sebuah evaluasi. Sebuah kebijakan yang telah dijalankan perlu mendapatkan masukan secara periodik untuk dapat menilai tingkat keberhasilannya (Airlanda, 2016). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi diri yang dapat menganalisis program PPG Prajabatan Besubsidi ini. Evaluasi secara kelembagaan baik itu tim pengelola teknis ataupun Kementerian menjadi kegiatan yang cukup sulit dilakukan karena bersifat nasional dengan area yang luas. Namun, evaluasi diri mahasiswa yang telah menjalani program PPG Prajabatan Bersubsidi merupakan kegiatan yang cukup mudah dilakukan karena bersifat lebih

eksklusif (dalam area terbatas). Melalui kegiatan evaluasi diri, maka dapat dilakukan identifikasi masalah, penilaian program hingga pencapaian sasaran (BAN-PT, 2017). Manfaat inilah yang sangat diperlukan untuk kembali ke tujuan awal dalam rangka menyeimbangkan kualitas layanan guru profesional dengan peningkatan standar kesejahteraan guru.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa analisis hasil evaluasi diri mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD yang dilakukan PGSD UKSW tahun ajaran 2017/2018 sangatlah penting. Hasil analisis ini akan mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi secara nyata hingga pada akhirnya dapat menunjang perbaikan program. Seluruh kegiatan ini menjadi sangat perlu dilakukan, mengingat PGSD UKSW telah mendapatkan susulan 22 orang mahasiswa program PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD Tahap II sejak 6 Agustus 2018. Periode program yang bertumpuk menjadikan hasil analisis evaluasi diri sangat dinantikan. Di sisi lain, tulisan analisis ini akan menjadi dasar untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan *treatment* dan instrumen yang lebih lengkap.

## Metode

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode survei menyeluruh. Peneliti melakukan analisisnya dengan menggali bukti, menelaah fenomena dan berdasarkan hasil penelaahan itu dirumuskan sebuah teori. Kunci dari keberhasilan metode ini adalah keikutsertaan peneliti dalam proses dan interaksi dengan objek penelitiannya (Sudjana, 2004). Sesuai dengan pernyataan tersebut, peneliti merupakan bagian dari tim pengelola teknis PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW 2017/2018. Metode spesifik berupa survei digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada kelompok tertentu secara spesifik. Melalui survei yang dilakukan, peneliti dapat fokus pada permasalahan serta mampu menganalisis berdasarkan tingkat dominansi fakta yang terungkap serta alasan yang mendasari fakta tersebut (Leeuw, Hox & Dillman, 2013). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei *online* menggunakan *google form* dengan indikator evaluasi diri mahasiswa tentang analisis kurikulum PPG Prajabatan. Indikator dikembangkan dari Panduan PPG 2017 sebagai bagian dari prinsip penjaminan mutu program (RISTEKDIKTI, 2017). Berikut ini adalah tabel yang memuat indikator evaluasi diri mahasiswa:

**Tabel 1. Indikator Evaluasi Diri Mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW**

No	Evaluasi Diri Tentang Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi
	Indikator
1	Kelengkapan Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi
2	Sistem Perkuliahan PPG Prajabatan Bersubsidi
3	Poin-poin Regulasi Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi
4	Keterkaitan Undang-undang Guru
5	Dokumen Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi
6	Arah Pengembangan Guru Profesional
7	Tingkat Keaktifan Mahasiswa dalam Mendukung Program PPG Prajabatan Bersubsidi
8	Keyakinan Peserta Terhadap Program PPG Prajabatan Bersubsidi

Penelitian ini menggunakan *convenience sampling* yang berarti menggunakan seluruh populasi yang ada sebagai obyek penelitian (Sedgwick, 2013). Dalam hal ini terdapat 54 orang mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW tahun ajaran 2017/2018. Mereka terdiri dari 24 Laki-laki dan 30 Perempuan. Kesimpulan diambil dari dominansi fakta yang muncul terkait indikator yang telah ditentukan serta analisis kajian pustaka.

### Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan negara besar yang berani mencanangkan peningkatan motivasi dan kualitas pekerjaannya (termasuk guru di sektor pendidikan) yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional sekaligus (Santoso, 2013). Pernyataan ini telah tertuang dalam dokumen negara dengan judul "*Indonesian Qualification Framework*" sejak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun 2013. Dengan pernyataan yang telah dipublikasikan secara internasional, maka Indonesia wajib menepati serta mengupayakan segala hal untuk mewujudkannya. Tidak dipungkiri bahwa perbaikan kualitas di sektor pendidikan terlihat nyata dari tahun ke tahun. Hasil penelitian Saifulloh, Muhibbin dan Hermanto (2012) menyatakan bahwa perbaikan mutu pendidikan telah dimulai dengan mengadakan: *workshop*, seminar, inovasi pembelajaran serta penataran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Jauh sebelum beberapa rujukan ini diterbitkan, telah ada PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 yang mengatur "Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru". Peraturan tersebut mengatur bahwa standar kualifikasi guru SD adalah sebagai berikut:

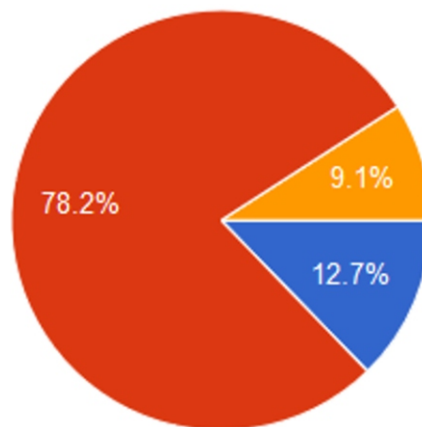
"Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi."

Sedangkan untuk standar kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi yaitu: pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Jika dicermati dengan teliti, bagian dari kompetensi inti yang diatur oleh Undang-undang salah satunya tentang penguasaan prinsip kurikulum.

Program PPG hadir untuk memenuhi tuntutan penyediaan guru profesional Indonesia yang harus dibuktikan dengan Sertifikat Pendidik (RISTEKDIKTI, 2017). Kewajiban tersebut telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Oleh karena itu, PPG merupakan program yang tidak bisa dihindari lagi bagi seluruh calon guru di Indonesia. Ditinjau dari segala macam landasan hukum yang berlaku terkait PPG, dapat diketahui harapan pemerintah Indonesia yang cukup tinggi untuk memajukan dunia pendidikan nasional. Sistem yang telah dibentuk seperti: proses penerimaan, seleksi, pembinaan, ujian hingga evaluasi PPG merupakan sarana pendukung majunya kualitas pendidikan. Kunci utama dari keberhasilan harapan mulia ini adalah kualitas personal dari guru-guru Indonesia. Indikator teknis yang dapat dijadikan tolok ukur adalah kompetensi inti seorang guru.

Terdapat banyak indikator kompetensi inti seorang guru professional khususnya guru SD. Namun, satu indikator yang terdeteksi secara mendalam/teliti dapat menjadi gambaran sederhana tingkat ketercapaian program ini. Ditinjau dari kompetensi inti “Penguasaan Prinsip Kurikulum” telah ditemukan beberapa fakta di bawah ini. Pemerintah telah menyediakan Pedoman Penyelenggaraan PPG tahun 2017 yang bisa diakses oleh semua pihak. Dokumen ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW karena memuat: definisi, tujuan, *outcome*, seluruh detail kegiatan PPG, sistem penilaian, hingga standar guru professional. Melalui data hasil evaluasi diri mahasiswa dapat dianalisis gambaran awal tentang kualitas guru hasil program ini.

#### a. Pemahaman Mahasiswa tentang Kelengkapan Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD



**Gambar 1. Hasil Evaluasi Diri Pemahaman Mahasiswa PPG tentang Kelengkapan Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD**

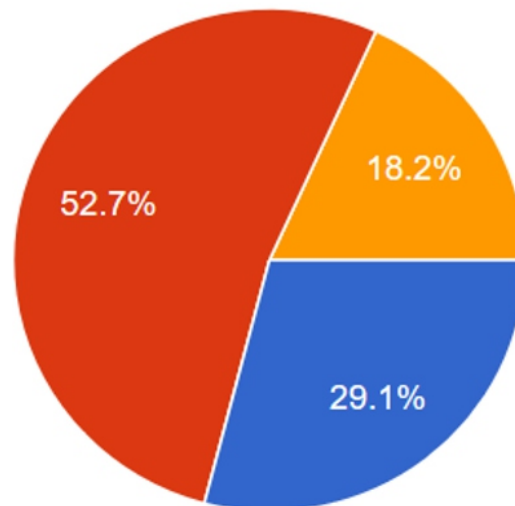
Data tersebut menunjukkan 3 kategori evaluasi diri mahasiswa PPG. Hanya terdapat 12,7% atau 7 dari 54 mahasiswa yang menyatakan telah membaca secara keseluruhan prinsip-prinsip kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD serta memahaminya. Namun, sebagian besar atau sebesar 78,2% menyatakan bahwa mereka hanya memahami poin-poin yang mereka anggap penting saja. Sisanya sebesar 9,1% atau 5 dari 54 orang mahasiswa menyatakan bahwa tidak membaca dan tidak memahami kurikulum tersebut. Keadaan ini sebenarnya sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan PPG 2017 yang tidak mensyaratkan peserta untuk memahami terlebih dahulu *output*, tujuan serta kurikulum yang nantinya akan berlaku bagi mereka sendiri selama mengikuti PPG. Dari 11 syarat yang diwajibkan, seluruhnya berkaitan dengan berkas administrasi seperti: ijazah, IPK, surat keterangan sehat, surat kesediaan tidak menikah dan lainnya (RISTEKDIKTI, 2017). Kondisi ini berbeda cukup signifikan dengan hasil penelitian internasional yang menyatakan bahwa perubahan kualitas pendidikan didukung oleh pemahaman seorang guru tentang perspektif program pendidikan, pemahaman tentang stakeholder dan perangkatnya (Ntim, 2017). Secara lengkap dijelaskan bahwa tanpa memahami segala macam detail yang berkaitan dengan profesinya, maka seorang

guru tidak akan mampu meningkatkan kualitasnya. Hal ini selaras dengan logika, jika seseorang tidak memahami lingkungan sekitarnya, dia akan merasa tidak ada masalah, sudah benar, sudah lengkap sehingga tidak terpikir kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Tuntutan guru SD profesional sangatlah besar. Mereka diminta untuk mengajar dalam konsep tematik, menguasai minimal lima muatan pembelajaran (IPA, IPS, Matematika, PKn, Bahasa Indonesia) sekaligus, mengembangkan perangkat pembelajaran dan sebagainya. Namun, ironis jika mereka sendiri tidak tahu atau tidak menganggap penting tentang kurikulum pembelajaran yang mereka ambil untuk membuat diri mereka menjadi profesional. Dengan data ini, diharapkan terjadi perbaikan yang terarah untuk membentuk guru berkualitas bukan guru yang dipenuhi dengan macam-macam administrasi saja.

#### **b. Pemahaman Mahasiswa tentang Regulasi Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD**

Regulasi kurikulum adalah setiap detail komponen kurikulum yang terdiri dari: 1) rasionalisasi kurikulum, 2) tujuan, 3) materi, 4) aktivitas yang dilakukan, 5) teknik pengajaran, 5) sumber belajar, 6) teknik pengelompokan, 7) lokasi dan waktu pelaksanaan, 8) teknik penilaian. Seluruh rincian regulasi ini, perlu dipahami oleh pelaksana kegiatan (dalam hal ini mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi) melalui sosialisasi dari pengelola ataupun pemahaman mandiri. Tanpa pemahaman regulasi yang baik, maka tujuan akhir kurikulum menjadi tidak fokus dan sulit untuk dicapai (Kuiper *et al*, 2013).



**Gambar 2. Hasil Evaluasi Diri Pemahaman Mahasiswa PPG tentang Regulasi Kurikulum PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD**

Diketahui sebesar 52,7% mahasiswa PPG masih merasa bingung dengan regulasi kurikulum PPG dan masih muncul banyak pertanyaan yang tidak tersampaikan. Sekitar 29 dari 54 orang mahasiswa ini, lebih memilih diam dan mengabaikan ketidakpahaman mereka terhadap regulasi kurikulum PPG yang mereka jalani. Jika dikonfirmasi lebih dalam melalui tanya jawab, mereka memilih



untuk mengikuti seluruh instruksi yang diberikan pengelola tanpa harus memahami maksud, tujuan ataupun *outcome* yang diharapkan program PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD. Sikap pasif ini bertolak belakang dengan prinsip *high order thinking skill (HOTS)* sebagai syarat pembelajaran modern Indonesia. Sebesar 29,1% menyatakan bahwa mereka sudah memahami dengan baik regulasi kurikulum PPG yang ada. Sisanya 18,2% mahasiswa menyatakan bahwa mereka hanya memahami sebagian kecil regulasi yang ada. Jika dilihat dari periode pelaksanaan PPG Prajabatan Bersubsidi mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan perkuliahan memang sesuai dengan fakta di atas. Masa orientasi yang dijadwalkan selama 3 hari justru habis untuk menyamakan persepsi tentang perangkat pembelajaran SD yang dinilai cukup bervariasi.

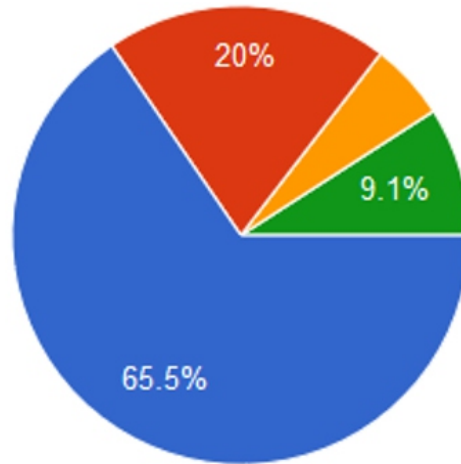
Hasil penelitian Priestley *et al* (2015) menjelaskan bahwa: *“the professional teacher have to understand teacher agency comes from top-down control of curricula, either through input regulation (prescription of content, methods and/or teaching materials) or output regulation (steering through outcomes).”* Pernyataan ini menguatkan penjelasan logis bahwa pelaksana pembelajaran wajib mengetahui seluk beluk kurikulum yang mereka jalani, bukannya malah diacuhkan dan bertindak pasif. Hernawan dan Susilana (2016) menyatakan bahwa kurikulum merupakan alat/sarana mengarahkan mahasiswa untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri selalu mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Prinsip dinamis ini tentunya harus diimbangi dengan pemahaman yang utuh tentang regulasi kurikulum yang dilaksanakan. Semakin lengkap pemahaman regulasi kurikulum yang dimiliki, maka mahasiswa akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.

### **c. Pemahaman Mahasiswa Tentang Isi Undang-undang yang Berkaitan dengan Profesi Guru di Indonesia**

Guru profesional Indonesia yang bekerja di sekolah dasar negeri ataupun swasta hendaknya memahami dengan baik aturan yang berlaku. Selaras dengan analisis kebijakan pemerintah yang diteliti oleh Airlanda (2016) menjelaskan bahwa guru merupakan bagian dari “wajah pemerintah” dalam hal pelayanan publik. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat (dalam hal ini siswa) maka diperlukan pemahaman yang benar terhadap peraturan pemerintah yang dibuat dalam rangka standarisasi kualitas. Secara spesifik undang-undang yang mengatur kualitas guru profesional, dapat dilihat dari “Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2017, yaitu: a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen; b) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Keempat peraturan tersebut tertulis secara jelas di bagian pertama dari buku pedoman penyelenggaraan PPG. Hal ini berarti bahwa keempat peraturan tersebut adalah penting dan wajib dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tahap pelaksanaan PPG. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang mencermati urutan pola pikir dalam sebuah buku pedoman penyelenggaraan program merupakan bagian tersulit untuk diubah. Terkadang perilaku ini menimbulkan dampak yang cukup

serius terhadap keberhasilan sebuah program. Ternyata data serupa juga muncul dari hasil evaluasi diri mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW. Data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3. Hasil Evaluasi Diri Pemahaman Mahasiswa PPG tentang Isi Undang-undang yang berkaitan dengan Profesi Guru di Indonesia**

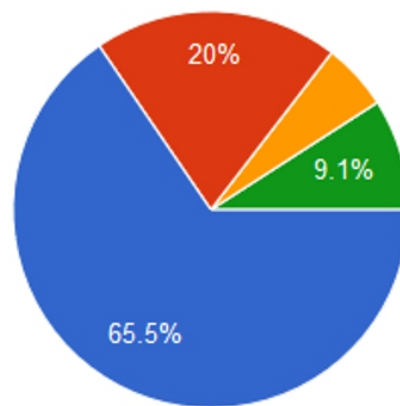
Data menunjukkan bahwa 40% mahasiswa PPG Prajabatan telah memahami isi undang-undang yang berkaitan dengan profesi guru. Namun, 30,9% kurang memahami ditambah dengan 29,1% mahasiswa tidak memahami isi undang-undang tersebut. Jika ditotal, terdapat 33 dari 54 orang mahasiswa dalam kategori kurang hingga belum memahami. Prosentase ini kembali menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas. Memang menurut pedoman penyelenggaraan PPG tidak pernah diatur ataupun ditemukan kaitan pemahaman peraturan perundangan dengan syarat guru profesional. Pernyataan ini, terlihat bertolak belakang dengan “Modul Pelatihan Dasar Kader PNS tentang Pelayanan Publik” yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada Desember 2016. Hampir sebagian besar mahasiswa PPG Prajabatan menginginkan untuk lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Keadaan ini dibuktikan dengan jumlah izin yang telah diterima oleh dosen pengampu sejak bulan Oktober-Desember 2018. Bahkan beberapa jadwal Ujian Tulis Lokal sebagai bagian dari penyelenggaraan program PPG, harus diatur ulang oleh tim pengelola PPG UKSW agar seluruh mahasiswa dapat mengikuti ujian tersebut tanpa izin.

Ditinjau dari pemahaman Lembaga Administrasi Negara, unsur pertama dari pegawai negeri yang baik dan pelayan publik yang baik adalah memahami bahwa setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga prinsip kerja harus selaras dengan peraturan tersebut. Senada dengan pandangan tersebut, Guerriero (2014) yang tergabung sebagai peneliti pendidikan di negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, memberi tagline: “Better Policies for Better Lives” dalam tulisannya yang berjudul: “*Teachers' Pedagogical Knowledge and the Teaching Profession*”. Melalui tulisan ini Guerriero ingin menyampaikan hasil analisisnya, bahwa pengatur dan pelaksana kebijakan harus saling bekerjasama untuk menghadirkan

kebijakan pendidikan demi peningkatan kualitas dunia. Ini berarti pelaksana kebijakan (termasuk guru) wajib memahami latar belakang hingga cara mengimplementasikan kebijakan di level teknis. Bukan suatu hal yang mudah, tetapi bila diabaikan tentu akan memperparah keadaan sebelumnya.

#### **d. Peran Mahasiswa dalam Memahami Arah Pengembangan Guru Profesional di Indonesia**

Bagian ketiga dari analisis ini dijelaskan tentang pemahaman pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan idealisme tersebut, dibutuhkan peran aktif dari pihak pelaksana kebijakan untuk bersedia mencari tahu, memahami hingga melaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Dalam kasus ini, akan dijelaskan peran mahasiswa PPG Prajabatan bersubsidi terkait arah pengembangan guru profesional Indonesia.



**Gambar 4. Hasil Evaluasi Diri Peran Mahasiswa PPG terkait Arah Pengembangan Guru Profesional di Indonesia**

Sebesar 65,5% mahasiswa telah mencoba melakukan diskusi dengan dosen dan sesama rekan mahasiswa lebih dari 5 kali dalam satu bulan. Sedangkan 9,1% mahasiswa belum melakukan diskusi sama sekali tentang arah pengembangan guru profesional. Diskusi tersebut dapat dilakukan selama lokakarya mahasiswa PPG Prajabatan yang berlangsung hampir selama 4 bulan. Tahap lokakarya ini harus dilalui mahasiswa mulai pukul 07.30 hingga 16.30 setiap Senin hingga Jumat. Waktu yang sangat panjang tersebut, perlu digunakan secara bijak. Jika ditinjau dari hasil survey, ditemukan bahwa mahasiswa sangat aktif untuk mencoba memahami arah pengembangan profesionalisme guru. Mereka banyak melakukan diskusi dan mencari bahan perbandingan. Kelemahan yang ditemui mahasiswa adalah: 1) minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang cara pengembangan profesionalisme guru masa kini; 2) rancangan kurikulum PPG Prajabatan yang tidak mengarah ke pembahasan tersebut; 3) pembiasaan administratif yang jauh lebih dominan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui beberapa catatan hasil evaluasi diri mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD. Hasil evaluasi ini, dapat dijadikan identifikasi awal untuk dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait penyediaan kurikulum guru profesional. Pembahasan ini juga

dapat digunakan untuk memperkaya data evaluasi pelaksanaan program PPG Prajabatan. Program untuk meningkatkan profesionalisme guru seharusnya menjadi prioritas untuk juga meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Negara-negara Eropa yang sudah memiliki standar pendidikan tinggi justru sangat memperhatikan hasil evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas mereka dari tahun ke tahun. Keadaan ini tercermin dalam buku *"Evaluation for Improving Student Outcomes"* yang diterbitkan oleh *European Center for the Development of Vocational Training (2011)*. Dalam buku ini, terdapat satu bab tersendiri yang berisi tentang *Participatory approach to self-assessment in the Winterhude Reform School (Gesamtschule Winterhude) in Hamburg*. Mereka mengklaim bahwa evaluasi diri adalah alat yang kuat untuk mengetahui kelemahan serta kelebihan sistem yang telah mereka bangun. Melalui evaluasi diri ini juga dapat diketahui peningkatan kualitas dan catatan perubahan yang sudah dilakukan dari masa ke masa. Seharusnya, kajian ini dapat menjadi contoh yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW.

### **Kesimpulan**

Hasil survey yang telah dilakukan terhadap evaluasi diri mahasiswa PPG Prajabatan Bersubsidi Guru Kelas SD UKSW memunculkan beberapa catatan. Analisis evaluasi diri didasarkan pada Panduan PPG 2017. Catatan tersebut berupa: 1) terdapat 78,2% mahasiswa yang belum memahami dengan jelas kelengkapan kurikulum PPG Prajabatan yang ada; 2) sebesar 52,7% mahasiswa bingung dalam memahami regulasi kurikulum PPG; 3) baru 40% mahasiswa berhasil memahami isi undang-undang yang berkaitan dengan guru profesional Indonesia; 4) sebesar 65,5% mahasiswa PPG Prajabatan aktif dalam membahas tentang arah perkembangan guru profesional Indonesia. Tulisan ini sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan analisis kurikulum PPG Prajabatan.

### **Daftar Pustaka**

- Airlanda, G.S. 2016. Analisis Kualitas Pendidikan Ditinjau dari Penerapan Kebijakan Sekolah Gratis di SMA Negeri 1 Weru Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Sains (JPS) Volume 4 No. 1* halaman 43-50.
- BAN-PT. 2017. Buku IV Pedoman Evaluasi Diri: Akreditasi Perguruan Tinggi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi: Jakarta
- European Centre for the Development of Vocational Training. 2011. *Evaluation for Improving Student Outcomes: Messages for Quality Assurance Policies*. Publications office of the European Union. (online), [http://www.cedefop.europa.eu/files/4107\\_en.pdf](http://www.cedefop.europa.eu/files/4107_en.pdf). Diakses 12 Desember 2018. DOI: 10.2801/96579
- Guerriero, S. 2014. *Teacher's Pedagogical Knowledge and the Teaching Profession: Background Report and Project Objectives*. OECD. (online), [http://www.oecd.org/edu/cei/Background document to Symposium ITEL-FINAL.pdf](http://www.oecd.org/edu/cei/Background%20document%20to%20Symposium%20ITEL-FINAL.pdf). Diakses 12 Desember 2018
- Hernawan, A.H., Susilana, R. 2016. *Konsep Dasar Kurikulum*. Universitas Pendidikan Indonesia. (online), [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/19620906198601](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/19620906198601)

- [1-AHMAD MUYADIPRANA/PDF/Konsep Dasar Kurikulum.pdf](#). Diakses 12 Desember 2018
- Kuiper, W., Nieveen, N., Berkvens, J. 2013. Curriculum Regulation and Freedom in the Netherlands- A Puzzling Paradox. Orational address. Enschede/Utrecht: S L O / U t r e c h t U n i v e r s i t y . ( o n l i n e ) [https://www.google.com/search?safe=strict&ei=nVEWXIKPHYekyAOeqKDYBQ&q=Kuiper%2C+W.%2C+Nieveen%2C+N.%2C+Berkvens%2C+J.+2013.+Curriculum+Regulation+and+Freedom+in+the+Netherlands - A + P u z z l i n g + P a r a d o x . + & o q = K u i p e r % 2 C + W . % 2 C + N i e v e e n % 2 C + N . % 2 C + B e r k v e n s % 2 C + J . + 2 0 1 3 . + C u r r i c u l u m + R e g u l a t i o n + a n d + F r e e d o m + i n + t h e + N e t h e r l a n d s - + A + P u z z l i n g + P a r a d o x . + & o q = K u i p e r % 2 C + W . % 2 C + N i e v e e n % 2 C + N . % 2 C + B e r k v e n s % 2 C + J . + 2 0 1 3 . + C u r r i c u l u m + R e g u l a t i o n + a n d + F r e e d o m + i n + t h e + N e t h e r l a n d s - + A + P u z z l i n g + P a r a d o x . + & g s \\_ l = p s y - a b . 3 . . 0 i 7 1 1 8 . 3 4 8 0 6 4 . 3 4 8 0 6 4 . . 3 4 9 1 7 6 . . . . 0 . 0 . . 0 . 0 . . . . . . . . 0 . . . . . 1 j 2 . . g w s - w i z . E W q i 0 \\_ g 9 a U 4 #](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=nVEWXIKPHYekyAOeqKDYBQ&q=Kuiper%2C+W.%2C+Nieveen%2C+N.%2C+Berkvens%2C+J.+2013.+Curriculum+Regulation+and+Freedom+in+the+Netherlands - A + P u z z l i n g + P a r a d o x . + & o q = K u i p e r % 2 C + W . % 2 C + N i e v e e n % 2 C + N . % 2 C + B e r k v e n s % 2 C + J . + 2 0 1 3 . + C u r r i c u l u m + R e g u l a t i o n + a n d + F r e e d o m + i n + t h e + N e t h e r l a n d s - + A + P u z z l i n g + P a r a d o x . + & g s _ l = p s y - a b . 3 . . 0 i 7 1 1 8 . 3 4 8 0 6 4 . 3 4 8 0 6 4 . . 3 4 9 1 7 6 . . . . 0 . 0 . . 0 . 0 . . . . . . . . 0 . . . . . 1 j 2 . . g w s - w i z . E W q i 0 _ g 9 a U 4 #). Diakses 12 Desember 2018
- Leeuw, E., Hox, J., Dillman, D. 2013. International Handbook of Survey Methodology. European Association of Methodology. (online), <http://www.eam-online.org>. diakses 7 Desember 2018
- Lembaga Administrasi Negara. 2016. Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS: "Pelayanan Publik". Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia: Jakarta. (online), <http://pusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/MODUL-PELAYANAN-PUBLIK-CETAK.pdf>. Diakses 12 Desember 2018
- Ntim, S. 2017. Transforming Teaching and Learning for Quality Teacher Education in Ghana: Perspectives from Selected Teacher Trainees and Stakeholders in Teacher Education. International Journal of Education Vol 9 No.3. DOI: 10.5296/ije.v9i3.11686
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Guru. Presiden Republik Indonesia. (online) [https://unnes.ac.id/wp-content/uploads/PP\\_74\\_Tahun\\_2008.pdf](https://unnes.ac.id/wp-content/uploads/PP_74_Tahun_2008.pdf). Diakses 11 Desember 2018
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Menteri Pendidikan Nasional republic Indonesia. (online) [https://www.slideshare.net/kreasi\\_cerdik/permendiknas-nomor-16-tahun-2007](https://www.slideshare.net/kreasi_cerdik/permendiknas-nomor-16-tahun-2007). Diakses 11 Desember 2018
- Permendiknas Nomor 87 Tahun 2013. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (online), <https://www.google.com/search?q=Peraturan+Menteri+Pendidikan+dan+Kebudayaan+Nomor+87+Tahun+2013&oq=Peraturan+Menteri+Pendidikan+dan+Kebudayaan+Nomor+87+Tahun+2013&aqs=chrome..69i57j69i59.1283j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>. Diakses 7 Desember 2018
- Priestley, M., Biesta, G.J.J., Philippou, S. & Robinson, S. 2015. The Teacher And The Curriculum: Exploring Teacher Agency. In D. Wyse, L. Hayward & J. Pandya (Eds.), The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment. London: SAGE Publications Ltd
- RISTEKDIKTI. 2017. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: Jakarta
- RISTEKDIKTI. 2017. Pendaftaran Online PPG Prajabatan Bersubsidi Gelombang 2. Website PPG RISTEKDIKTI. (online), <http://ppg.ristekdikti.go.id/daftar/>.

Diakses 7 Desember 2018

Saifulloh, M., Muhibbin, Z., Hermanto. 2012. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah. Jurnal Sosial Humaniora (JSH) Volume 5 No.2 halaman 206-217. DOI: <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>

Santoso, M. 2013. Indonesian Qualifications Framework. Ministry of Education and Culture. (online), [https://olc.worldbank.org/sites/default/files/Session%202.1 ESDP WfD Indonesia%20QF%20%281%29.pdf](https://olc.worldbank.org/sites/default/files/Session%202.1%20ESDP%20WfD%20Indonesia%20QF%20%281%29.pdf). Diakses 11 Desember 2018

Sedgwick, P. 2013. Convenience Sampling. BMJ Publishing. (online), <http://www.bmj.com/permissions>. Diakses 7 Desember 2018. DOI: 10.1136/bmj.f6304

Sudjana. 2004. Handout Perkuliahan Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Penelitian Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung. UPI Press

**Gamaliel Septian Airlanda**, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro No 52-60, Salatiga-Jawa Tengah-Indonesia 50711, Email : gairlanda@gmail.com